

04

Tahun ke-80
25 Januari 2026

HIDUP

Majalah Mingguan Katolik

DASAWINDU PAROKI KUMETIRAN

Dasawindu adalah perayaan kesetiaan lintas generasi
sebagai kumetir Kerajaan Allah.



GEREJA KATOLIK
HATI SANTA PERAWAN MARIA TAK BERCELA
KUMETIRAN - YOGYAKARTA

Jl. Kumetiran 13 Telp. (0274) 512817, 518586 Yogyakarta

ISSN 0376-6330



9 770376 633003 >

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Pastor Harry Sulisty **Pemimpin Perusahaan:** Freddy P. Yuwono **Wakil Pemimpin Redaksi:** Hasiholan Siagian **Wakil Pemimpin Perusahaan:** Ign Bagus Bayu Staf **Redaksi:** Yustinus H. Wuarmasuk, Felicia Permata Hanggu, Katharina Reny Lestari **Kepala Keuangan:** Ridho Mayasari **Staf Keuangan:** Simon Raylama **Kepala SDM dan Umum:** Daniel Satia **Staf SDM dan Umum:** Dodi Ilhamsyah, Zulkarnaen **Staf Sirkulasi:** Georgerio **Alamat Redaksi/Bisnis:** Jl. Kebon Jeruk Raya No. 85 Batusari Jakarta 11530, Telp. (021) 549.1537, (021) 530.8471, Fax. (021) 548.5737. Layanan: WA Bisnis (081585041781), Marketing dan Iklan (penjualan@hidupkatolik.com) Keuangan (keuangan@hidupkatolik.com) Sirkulasi (sirkulasi@hidupkatolik.com) **Penerbit:** Yayasan HIDUP Katolik Anggota SPS No.12/1947/II/D/2002, SIUPP No. 121/SK/MENPEN/SIUPP/C.1/1986. ISSN 0376-6330 **Percetakan:** PT Gramedia Jakarta (Isi di luar tanggung jawab percetakan) **Informasi Liputan:** Majalah dan Website: redaksihidup@hidup.tv (081292955952), **website:** www.hidupkatolik.com, **Instagram:** @hidupkatolik

Rekening IKLAN:
BCA Cabang Kemanggisan,
No. Rek. 5500859085, atas nama
Yayasan HIDUP Katolik.

Rekening SIKULASI:
- BCA Cabang Puntu Air, No. Rek.
106-300046-2, atas nama Yayasan
HIDUP Katolik.
- BRI Cabang Jakarta Veteran, No.
Rek. 0329-01-000616-30-8 atas
nama Yayasan HIDUP Katolik.
- Bank Mandiri Cabang Rawa
Belong, No. Rek. 1650089101126
atas nama Yayasan HIDUP Katolik

Wartawan HIDUP
selalu dibekali tanda pengenalan dan
tidak diperkenankan menerima/
meminta imbalan dari narasumber.

Dasawindu Paroki Kumetiran



MALIOBORO adalah nama yang tak pernah sepi dari ingatan. Ikon wisata Yogyakarta ini menjadi pusat denyut kehidupan kota: tempat berbelanja, bersua, dan menikmati aneka jajanan khas Jawa. Rasanya belum lengkap berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa menyusuri hiruk pikuk Malioboro dengan segala daya tariknya.

Namun, Malioboro dan sekitarnya bukan hanya pusat wisata duniawi. Tak jauh dari kawasan yang berimpitan dengan Stasiun Tugu, berdiri sebuah rumah ibadat Katolik yang sarat sejarah: Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela, Paroki Kumetiran, Yogyakarta, bagian dari Keuskupan Agung Semarang (KAS). Pada Desember 2025 lalu, gereja ini merayakan usia ke-80. Delapan puluh tahun bukan sekadar deretan angka, melainkan sebuah dasawindu perjalanan iman yang penuh dinamika.

Momentum ini mengajak umat dan hierarki Paroki Kumetiran untuk menoleh ke belakang sekaligus menatap ke depan. Sudah sejauh mana kehadiran umat Katolik memberi makna bagi Gereja dan masyarakat sekitar? Sejauh mana Gereja dengan pelindung Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela sungguh relevan bagi zaman dan signifikan bagi lingkungan sosialnya?

Sebagai paroki yang berada di jantung kota wisata, Paroki Kumetiran memiliki wajah umat yang beragam. Latar belakang ekonomi dan sosial yang majemuk menjadi tantangan pastoral tersendiri. Arus wisata, mobilitas tinggi,

dan kepadatan kawasan menuntut Gereja untuk terus adaptif dan peka membaca tanda-tanda zaman.

Menariknya, pada puncak perayaan 80 tahun yang dihadiri Uskup Agung Semarang, Mgr. Robertus Rubiyatmoko, Paroki Kumetiran menegaskan langkah pastoral ke depan. Gereja ingin melanjutkan semangat yang diwariskan Paus Fransiskus dan diteruskan oleh Paus Leo XIV: membangun Gereja yang sinodal, berjalan bersama, dan peduli pada mereka yang dipinggirkan. Gereja yang merangkul kaum miskin, difabel, serta anak-anak dan kaum muda yang mengalami kesepian dan pergulatan kesehatan mental di era digital.

Di tengah realitas sosial yang kompleks, para pelayan pastoral, pengurus paroki, dan para imam berkomitmen untuk hadir dengan tulus dan tanpa pamrih. Gereja diharapkan memancarkan wajah Allah di dunia yang terus berubah dan kerap terasa tidak baik-baik saja.

Sebagai Gereja di pusat Kota Yogyakarta dan kawasan wisata, visi menjadikan Paroki Kumetiran sebagai "Gereja wisata" pun kian relevan. Ribuan umat Katolik dari berbagai penjuru Nusantara yang berkunjung ke Malioboro membutuhkan ruang doa yang dekat, ramah, dan hidup. Melalui pembenahan dan penataan berkelanjutan, Paroki Kumetiran menegaskan jati dirinya sebagai paguyuban umat beriman—komunitas yang hidup, bertumbuh, dan setia berjalan bersama zaman. •

Kesejahteraan Umum yang Direnggut

DALAM Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *kolusi* berarti kerja sama tidak terpuji, persekongkolan. Sementara, kata *nepotisme* diartikan sebagai perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat; kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah; tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.

Dalam konteks sejarah Indonesia kata ini sempat pernah mencuat di tahun 1998, di sekitaran demo melengserkan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto dan harapan akan pembaharuan di masa Reformasi. Kala itu, kata *kolusi* dan *nepotisme* merupakan dosa sosial yang setara dengan kata *korupsi*. Slogan keras di mana-mana waktu itu adalah “Anti KKN” (Anti Korupsi-Kolusi-Nepotisme). Sayangnya, sementara ada komisi khusus yang mengurus tentang praktik-praktik korupsi, tidak ada komisi yang menjadi *watchdog*/pengawas atas tindakan-tindakan kolusi dan nepotisme. Konsekuensi logisnya, di masa di mana penindakan korupsi kian dipertanyakan, penanganan masalah kolusi dan nepotisme tinggallah angin lalu.

Di hadapan rentang ingatan sejarah bangsa ini yang pendek, tema KKN lalu dianggap tidak pernah menjadi masalah. Di mana-mana politik dinasti dan upaya memperkaya diri bukan hanya ada, tetapi secara terang-terangan dibenarkan. Proses *kong kalikong* di sekitar pemilu hanya satu di antaranya. Salah satu yang terkenal adalah tender untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan oknum keluarga dan anggota DPR. Anehnya, tidak ada lagi protes setelah penjelasan Kepala Badan Gizi Nasional, yang mengatakan, “Semua warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi mitra program MBG” (*Tempo.co*, 23 september 2025).

Banyak celah bisa dipertanyakan di atas pertanyaan ini, “Apakah di negeri ini kambing bisa diadu dengan gajah? Apakah UMKM bisa bersaing dengan anggota DPR? Bagaimana dengan mimpi meningkatkan pendapatan UMKM di tengah tidak adanya proteksi kepada kelompok kecil yang dibiarkan bersaing dengan pemilik modal besar?” UMKM yang mengadu nasib di dunia kuliner, harus bersaing dengan anggota DPR yang menggunakan ‘dana sampingannya’ untuk menjadi saingan pejuang receh dari usaha kuliner. Di sini klaim, “semua warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi mitra program MBG” teramat mudah untuk dibongkar.



Pastor Martinus Joko Lelono
Imam Diosesan Keuskupan
Agung Semarang
Pengajar di Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta

“Penindakan korupsi kian dipertanyakan, penanganan masalah kolusi dan nepotisme tinggallah angin lalu.”

Permasalahan lain yang berhubungan dengan proteksi kepada usaha kecil adalah ditemukannya praktik *kong kalikong* urusan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara yang rupanya sudah berlangsung pada periode 2021-2026. Modusnya adalah membayar pegawai pajak dengan uang suap tertentu dengan syarat mengurangi kewajiban pajak hingga 80 %. Dalam pernyataan, uang fee diserahkan kepada beberapa mudi Direktorat Jenderal Pajak (Kompas.com). Ketika membaca berita ini, orang tidak mudah percaya bahwa ini adalah satu-satunya kasus. Hanya, karena prinsip hukum *Praduga Tak Bersalah*, maka harus ada proses hukum yang terjadi sebelum menyatakan situasi ini adalah situasi yang jamak terjadi di negeri kita.

Pajak yang sedianya menjadi alat negara untuk meratakan pendapatan sehingga semua punya kewajiban sosial untuk turut bertanggung jawab atas kehidupan bangsa sesuai kemampuannya, dimanipulasi sehingga yang kaya berkontribusi kecil saja. Anehnya, orang-orang miskin yang tidak melakukan *kong kalikong* harus membayar pajak secara utuh. Dengan logika ini, meski jumlahnya beda, secara prosentase, orang miskin negeri ini berkontribusi ‘lebih banyak’ untuk pembangunan bangsa. Dalam bahasa Kitab Suci, “Janda miskin itu memberi lebih banyak ‘Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya’ (Mrk. 12: 43-44). Kembali ke tema anggota DPR, bahkan pajak mereka dibayar dari pajak rakyat.

Situasi ini berbanding terbalik dari mimpi Gereja. Gereja mengharapkan adanya kesejahteraan umum (*bonum commune*), “keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan, untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Setiap kelompok harus memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan serta aspirasi-aspirasi kelompok-kelompok lain yang wajar, bahkan kesejahteraan umum segenap keluarga manusia” (GS 26). Di dalamnya, masyarakat punya kepedulian, tidak saling menang-menangan.

Sudah wajar yang kaya berkontribusi lebih besar. Adalah tidak wajar kalau yang sudah mengambil kesempatan si miskin masih menuntut si miskin berkontribusi lebih besar. •